

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RPJMD TAHUN 2014-2019

“JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK”

MISI 1 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN.

TUJUAN 1				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan perluasan lapangan kerja	1 Persentase penduduk yang bekerja.	$(\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}) / (\text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$	95,65%	96,27%
	2 Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	$(\text{Jumlah Pengangguran}) / (\text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$	4,18%	3,73%
	3 Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial.	$(\sum \text{kasus Perselisihan HI thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{Perkara Perselisihan HI thn (n-1)}) \times 100\%$	14,62%	25,00%

SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN				
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja	Persentase penduduk yang bekerja.	$(\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}) / (\text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$	95,65%	95,78%	95,88%	95,98%	96,08%	96,18%	Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan & perkotaan. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kompetensi, serta ketrampilan tenaga kerja.	1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	$(\text{Jumlah Pengangguran}) / (\text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$	4,18%	4,11%	4,04%	3,97%	3,81%	3,73%		

2.Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial.	$(\sum \text{kasus Perselisihan HI thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{Perkara Perselisihan HI thn (n-1)}) \times 100\%$	14,62%	17,00%	19,00%	21,00%	23,00%	25,00%	Peningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif.	3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja 4) Program Perluasan dan Penempatan Kerja
---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--

TUJUAN 2				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan pemerataan, perluasan pendidikan dan akses	1 Angka rata-rata lama sekolah	(Jumlah lama sekolah seluruh penduduk)/(Jumlah Penduduk Seluruhnya)	8,4	9,1
	2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(Jumlah Siswa Usia 7-12 th di SD/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 th) x 100%	97,83%	98,1%
	3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(Jumlah Siswa usia 13-15 th di SMP/Sederajat)/(Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13-15 th) x 100%	86,36%	87,36%
	4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	(Jumlah Siswa Usia 16-18 th di SMA/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 16-18 th) x 100%	60,78%	64,9%
	5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	(Jumlah Siswa Keseluruhan SD/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 th) x 100%	112,72%	113,1%
	6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	(Jumlah Siswa Keseluruhan SMP/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 13-15 th) x 100%	102,35%	103,11%
	7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	(Jumlah Siswa Keseluruhan SMA/Sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 16-18 th) x 100%	78,23%	83,44%
	8 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	(Jumlah Siswa Keseluruhan PAUD)/(Jumlah Penduduk Usia 0-6 th) x 100%	79,40%	80,97%
	9 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah \geq Sarjana/ Pasca Sarjana	(Jumlah Guru yg berijazah \geq Sarjana/ Pasca Sarjana)/(Jumlah Guru) x 100%	80,30%	98,10%
	10 Persentase pemuda berprestasi yang dibina	(Jumlah Pemuda Berprestasi)/(Jumlah Pemuda Terampil dan Mandiri) x 100%	40%	75,00%
	11 Persentase atlet berprestasi yang dibina	(Jumlah Atlet Berprestasi)/(Jumlah Atlet Pelajar Berbakat) x 100	35,50%	63,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	Angka rata-rata lama sekolah	(Jumlah lama sekolah seluruh penduduk)/(Jumlah Penduduk Seluruhnya)	8,4	8,7	8,8	8,9	9	9,1	Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(Jumlah Siswa Usia 7-12 th di SD/Sederajat) / (Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 th) x 100%	97,83%	97,93%	97,96%	97,99%	98,02%	98,1%		

	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(Jumlah Siswa usia 13-15 th di SMP/Sederajat) / (Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13-15 th) x 100%	86,36%	86,58%	86,7%	86,82%	86,98%	87,36%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6) Program Pendidikan Tinggi 7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA /SMK/MA/Paket C	(Jumlah Siswa Usia 16-18 th di SMA/Sederajat) / (Jumlah Penduduk Usia 16-18 th) x 100%	60,78%	61,3%	62,11%	62,94%	63,9%	64,9%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	(Jumlah Siswa Keseluruhan SD/ Sederajat) / (Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 th) x 100%	112,72%	112,79 %	112,84%	112,93%	113,01%	113,1%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	(Jumlah Siswa Keseluruhan SMP/ Sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 13-15 th) x 100%	102,35%	102,4%	102,45%	102,52%	102,86%	103,11%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	(Jumlah Siswa Keseluruhan SMA/ Sederajat)/(Jumlah Penduduk Usia 16-18 th) x 100%	78,23%	80,05%	80,9%	81,17%	82,18%	83,44%		
2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	(Jumlah Siswa Keseluruhan PAUD) / (Jumlah Penduduk Usia 0-6 th) x 100%	79,40%	79,54%	80,64%	80,74%	80,83%	80,97%	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas PAUD	
3.Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase kualifikasi guru menurut ijazah \geq Sarjana/ Pasca Sarjana	(Jumlah Guru yg berijazah \geq Sarjana/ Pasca Sarjana)/(Jumlah Guru) x 100%	80,30%	83,39%	87,34%	91,34%	95,34%	99,34%	Meingkatkan kualitas dan layanan pendidikan. Meningkatkan minat baca masyarakat.	
4.Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase pemuda berprestasi yang dibina	(Jumlah Pemuda Berprestasi)/(Jumlah Pemuda Terampil dan Mandiri) x 100%	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%	68,00%	75,00%	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas.	1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2)
	Persentase atlet berprestasi yang dibina	(Jumlah Atlet Berprestasi) / (Jumlah Atlet Pelajar Berbakat) x 100	35,50%	43,47%	51,00 %	55,00%	60,00%	63,00%	Meningkatkan prestasi olahraga diberbagai event	

TUJUAN 3				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	(Jumlah Tenaga Medis)/(1.000 jumlah penduduk)	17,00	30,00
	2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	(Kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat Kabupaten/Kota 2014))/ (Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH	97,39	97,1
	3 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	(Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wil.ker.pada kurun waktu tt)/ (Jml kelahiran hidup di wil.ker.pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH	28,31	22,12
	4 Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,09	71,18
	5 Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	(Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda terintegrasi JKN)/(Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100%	0%	70,00%
	6 Persentase cakupan peserta KB aktif	(Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tt) / (Jumlah pasangan usia subur) x 100% Keterangan : Cakupan Peserta KB Aktif menunjukkan Tingkat Pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur(PUS). Program KB di BPPKB adalah pemasangan alat kontrasepsi Pil KB Satu Hormon yaitu untuk Ibu menyusui	63,00%	68,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis secara merata	Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	Jumlah Tenaga Medis) / (1.000 jumlah penduduk)	16,00	17,00	24,00	26,00	28,00	30,00	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa dan wilayah kepulauan	1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	(Kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat Kabupaten/Kota 2014)) / (Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH	97,39	97,29	97,25	97,2	97,15	97,1	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita.	3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5) Program Upaya Kesehatan Perorangan 6) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 7) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan 8) Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 9) Program Pengendalian Penyakit

	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wil.ker.pada kurun waktu ttt)/ (Jml kelahiran hidup di wil.ker.pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH	28,31	26,48	24,74	23,87	23,00	22,12		
3.Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,09	70,7	70,82	70,94	71,06	71,18	Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan saringannya. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.	10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 11) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4.Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	(Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda terintegrasi JKN)/(Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100%	0,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesda yang komprehensif dan terpadu	
5.Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)	Persentase cakupan peserta KB aktif	(Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu ttt) / (Jumlah pasangan usia subur) x 100% Keterangan : Cakupan Peserta KB Aktif menunjukkan Tingkat Pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur(PUS). Program KB di BPPKB adalah pemasangan alat kontrasepsi Pil KB Satu Hormon yaitu untuk Ibu menyusui	63,00%	64,00%	65,00%	66,00%	67,00%	68,00%	Meningkatkan layanan KB dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan.	1) Program Pelayanan Kontrasepsi 2) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 4) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

TUJUAN 4					
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019	
Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan	1	Persentase penduduk miskin	$(\text{Jumlah Penduduk Miskin}) / (\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}) \times 100\%$	13,50%	10,19%
	2	Persentase penurunan PMKS	$((\sum \text{PMKS thn (n)} - \text{thn (n-1)}) / (\sum \text{PMKS thn (n-1)})) \times 100\%$	1,41%	1,50%
	3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$(\text{Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah}) / (\text{Angka partisipasi keseluruhan di lembaga pemerintah}) \times 100\%$	18,00%	34,00%
	4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain : dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. Dimana IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender.</p> <p>$1/3 [\text{Xede (1)} + \text{Xede (2)} + \text{linc-dist}]$ Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan</p>	66,56	70,85
	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	<p>(IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>$1/3 (\text{lpar} + \text{IDM} + \text{linc-dist})$ lpar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan</p>	69,29	72,24

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1. Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	$(\text{Jumlah Penduduk Miskin}) / (\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}) \times 100\%$	13,50%	12,21%	11,72%	11,22%	10,70%	10,19%	Meningkatkan penerpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu (lokus-fokus)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA 3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
2. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penurunan PMKS	$(\sum \text{PMKS thn } (n) - \text{thn } (n-1)) / (\sum \text{PMKS thn } (n-1)) \times 100\%$	1,41%	1,41%	1,42%	1,45%	1,47%	1,50%	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitas PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2) Program Pemberdayaan Sosial

										<ul style="list-style-type: none"> 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 4) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 5) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 6) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial
3.Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	(Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah)/(Angka partisipasi keseluruhan di lembaga pemerintah) x 100%	18,00%	20,00%	28,00%	30,00%	32,00%	34,00%	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain : dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. Dimana IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. $\frac{1}{3} [Xede (1) + Xede (2) + linc-dist]$ Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan	66,56	68,39	69,00	69,61	70,22	70,85		2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	IPG adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain : dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. Dimana IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender.	68,17	70,42	71,02	71,62	72,32	72,89		

MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, BERBASIS AGROBISNIS/AGROINDUSTRI DAN INDUSTRIALISASI.

TUJUAN 5				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	1 Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)	$(\text{Jumlah kontribusi UKM}) / (\text{Total PDRB Jawa Timur}) \times 100\%$	54,64	55,11
	2 Prosentase koperasi aktif	$(\text{Jumlah Koperasi Aktif}) / (\text{Total Koperasi}) \times 100\%$ Kriteria Koperasi Aktif : melaksanakan RAT Minimal setahun sekali	79,46%	81,03%
	3 Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	$(\sum \text{Wirausaha Baru thn (n-1)} - \text{thn (n)}) / (\sum \text{Wirausaha Baru thn (n-1)}) \times 100\%$	8,80%	10%
	4 Rasio perputaran modal Kopwan	$(\text{Jumlah perputaran modal yang dikururkan ke anggota kopwan icon Omset}) / (\text{Total Modal})$	1,90	2,5

SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN						
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1. Meningkatkan volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi	Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)	$(\text{Jumlah kontribusi UKM}) / (\text{Total PDRB Jawa Timur}) \times 100\%$	54,64	54,76	54,85	54,94	55,03	55,11	Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan. Meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam aktivitas ekonomi.	1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Prosentase koperasi aktif	$(\text{Jumlah Koperasi Aktif}) / (\text{Total Koperasi}) \times 100\%$ Kriteria Koperasi Aktif : melaksanakan RAT Minimal setahun sekali	79,46%	79,83%	80,13%	80,43%	80,73%	81,03%		

2.Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	$\frac{(\sum \text{Wirausaha Baru thn (n-1)} - \text{thn (n)})}{(\sum \text{Wirausaha Baru thn (n-1)})} \times 100\%$	8,80%	9,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru.	3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
3.Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	Rasio perputaran modal Kopwan	Jumlah perputaran modal yang dikururkan keanggota kopwan icon. Omset/(Total Modal)	1,90	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi femiisasi kemiskinan.	4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 6) Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

TUJUAN 6				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1 Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor tanaman pangan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor tanaman pangan thn (n-1)}) \times 100 \%$	1,84	2,05
	2 Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor tanaman perkebunan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor tanaman perkebunan thn (n-1)}) \times 100\%$	1,15	3,1
	3 Pertumbuhan sub-sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor peternakan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor peternakan thn (n-1)}) \times 100\%$	4,12	4,58
	4 Pertumbuhan sub-sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor kehutanan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor kehutanan thn (n-1)}) \times 100\%$	6,4	7,2
	5 Pertumbuhan sub-sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	$((\text{PDRB sub-sektor perikanan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor perikanan thn (n-1)})) \times 100\%$	4,5	5,3

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)	Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor tanaman pangan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor tanaman pangan thn (n-1)}) \times 100 \%$	1,84	1,90	1,96	2,07	2,04	2,05	Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.	1) Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan 2) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian 3) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian 4) Program peningkatan Produksi Perkebunan
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor tanaman perkebunan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor tanaman perkebunan thn (n-1)}) \times 100\%$	1,15	1,60	2,1	2,4	2,6	3,1		

										<ul style="list-style-type: none"> 5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 6) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan 7) Program peningkatan Produksi Peternakan 8) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 9) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan
	Pertumbuhan sub-sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor peternakan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor peternakan thn (n-1)}) \times 100\%$	4,12	4,26	4,38	4,63	4,57	4,58	Meningkatkan usaha penanganan paska panen, dan pengalihan hasil pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3) Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 6) Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan 7) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan
	Pertumbuhan sub-sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	$(\text{PDRB sub-sektor kehutanan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor kehutanan thn (n-1)}) \times 100\%$	6,4	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang terstandarisasi.	
	Pertumbuhan sub-sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	$((\text{PDRB sub-sektor perikanan thn (n)-thn (n-1)}) / (\text{PDRB sub-sektor perikanan thn (n-1)})) \times 100\%$	4,5	4,7	4,8	5	5,2	5,3		

										8) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
										9) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

TUJUAN 7				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatnya ketahanan pangan	1 Ketersediaan pangan (ton) - Beras - Jagung - Kedelai - Gading - Telor - Susu - Ikan - Gula	Jumlah Ketersediaan Pangan Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk	7.439.770 5.342.606 321.056 354.011 285.567 406.178 742.520 1.195.501	7,897,877 6,769,955 520,434 390,762 384,876 444,856 1,724,478 1,376,378
	2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi Skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang SPM).	82,05	87,7
	3 Prosentase konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)	Jumlah Penduduk Jatim yang mengkonsumsi beras /Jumlah Penduduk Jawa Timur x 100%	87,6%	81,2%
	4 Prosentase keamanan pangan	Jumlah pangan yang dikonsumsi / Jumlah pangan yang tersedia x 100%	80,00%	84,00%
	5 Prosentase Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV)	(Standar Deviasi)/(Harga rata-rata) x 100% Fluktuasi harga beras ditingkat konsumen berada pada nilai CV < 10% Coefisien Variasi (CV) adalah parameter untuk mengukur fluktuasi harga (naik turunnya) harga dalam kurun waktu tertentu (Bulanan)	10,00%	8,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability)	Ketersediaan pangan (ton)	Jumlah Ketersediaan Pangan							Meningkatkan stok pangan masyarakat.	1) Program Peningkatan Ketahanan pangan 2) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan 3) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
	- Beras - Jagung - Kedelai - Gading - Telor - Susu - Ikan - Gula	Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk	7.439.770 5.342.606 321.056 354.011 285.567 406.178 742.520 1.195.501	7.741.873 6.378,543 480,800 354.011 341.957 406.178 1.389.298 1.302.113	7.780.579 6.474.225 490.417 362.861 352.216 415,521 1.465.727 1.316.966	7.781.486 6.571.336 500.225 371.933 362.782 424.482 1.546.860 1.336.770	7.858.584 6.669.907 510.229 381.231 373.666 434.855 1.633.002 1.356.574	7.897.877 6.769.955 520.434 390.762 384.876 444.856 1.724.478 1.376.378		
2.Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi Skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang SPM).	82,05%	83.3%	84.4%	85.5%	86.6%	87.7%	Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan. Meningkatkan penanganan keamanan pangan.	
	Prosentase konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)	Jumlah Penduduk Jatim yang mengkonsumsi beras /Jumlah Penduduk Jawa Timur x 100%	87,6%	86.1%	85%	83.7%	82.4%	81.2%		

	Prosentase keamanan pangan	Jumlah pangan yang dikonsumsi / Jumlah pangan yang tersedia x 100%	78,00%	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%		
3.Meningkatnya akses pangan (food access)	Prosentase Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV)	(Standar Deviasi)/(Harga rata-rata) x 100% Fluktuasi harga beras ditingkat konsumen berada pada nilai CV < 10% Coefisien Variasi (CV) adalah parameter untuk mengukur fluktuasi harga (naik turunnya) harga dalam kurun waktu tertentu (Bulanan)	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Meningkatkan kelancaran distribusi pangan. Menjaga stabilitas harga pangan.	

TUJUAN 8				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri	1 Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun } (n)-(n-1)) / (\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun } (n-1))) \times 100\%}{}$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto</p> <p>ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	9,27%	10,47%

SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN						
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun } (n)-(n-1)) / (\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun } (n-1))) \times 100\%}{}$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto</p> <p>ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	9,27%	9,54%	9,69%	9,96%	10,08%	10,47%	<p>Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri.</p> <p>Meningkatkan kerja sama ekonomi & lokal, regional & internasional.</p> <p>Meningkatkan daya saing produk berbasis keunggulan lokal.</p>	<p>1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>3) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor</p>

TUJUAN 9				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri	1 Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun } (n)-(n-1)) / (\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun } (n-1))) \times 100\%}{}$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	5,3%	7,3%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya kontribusi sektor industri	Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	$\frac{((\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun } (n)-(n-1)) / (\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun } (n-1))) \times 100\%}{}$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	5,3%	5,7%	6,0%	6,4%	6,8%	7,3%	<p>Meningkatkan pengembangan sektor industri.</p> <p>Mengembangkan bahan baku substitusi impor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2) Program Penataan Struktur Industri 3) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri 4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

										5) Program Peningkatan Standarisasi Industri 6) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

TUJUAN 10				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Wisatawan mancanegara adalah seluruh wisatawan yang datang dari luar negeri	344.511	451.583
	2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Wisatawan nusantara adalah seluruh wisatawan yang datang dari dalam negeri	41.736.642	58.830.878
	3. Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	180	235
	4. Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	Nilai Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	75	86

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Wisatawan mancanegara adalah seluruh wisatawan yang datang dari luar negeri	344.511	344.511	368.626	394.430	422.040	451.583	Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Wisatawan nusantara adalah seluruh wisatawan yang datang dari dalam negeri	41.736.642	43.230.237	46.476.168	50.142.956	54.236.782	58.830.878		

2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	180	195	205	215	225	235	Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal.	1) Program Pengembangan Nilai Budaya 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	75	78	80	82	84	86		

TUJUAN 11				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah	1. Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	Minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip	54.36	78.39
	2. Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	Minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip	45.39	60.61
	3. Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM	37.22	54.52
	4. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	Nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM	37.89	56.51
	5. Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)	Nilai realisasi PMDN non fasilitas	86.83	123.79

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1. Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah	Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	Minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip	54.36	57.83	60.72	68.22	72.99	78.39	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu.	1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	Minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip	45.39	47.03	49.38	52.84	56.54	60.61		

	Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM	37.22	39.43	41.4	45.33	49.64	54.52		3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
	Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	Nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM	37.89	40.88	42.92	46.99	51.45	56.51		4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
	Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)	Nilai realisasi PMDN non fasilitas	86.83	89.79	94.28	103.24	113.05	123.79		5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN 12				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)	$=(\sum \text{Jalan provinsi kondisi baik+sedang})/(\sum \text{Panjang jalan provinsi}) \times 100\%$ <p>Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI (International Roughness Index)) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI (Road Condition Index). Kondisi baik nilai IRI 0-4, kondisi sedang nilai IRI 4-8; RCI minimum sedang</p>	85,27	97,54
	2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%)	$(\sum \text{Jalan provinsi memenuhi parameter})/(\sum \text{Panjang jalan provinsi}) \times 100\%$ <p>Parameter jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi penyediaan prasarana b. Lalu lintas harian rata-rata (smp/hari) c. Lebar jalur lalu lintas minimum d. Lebar bahu minimum e. Tipe perkerasan jalan minimum f. Kelandaian maksimum g. Kondisi bangunan pelengkap jalan (jembatan, gorong-gorong, dll) baik dan berfungsi 	55,01	66,07
	3. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	$=(\sum \text{Panjang jalan yang terbangun})/(\sum \text{Panjang rencana}) \times 100\%$ <p>Panjang jalan JLS rencana = 673,872 km Panjang Jalan Tembus Lawang Batu = 33,907 km Panjang Jalan Akses PIMPA = 3,300 km Panjang Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 64,000 km</p>	40,63	40,84
	4. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	$=(\sum \text{Panjang jembatan yang terbangun})/(\sum \text{Panjang rencana}) \times 100\%$ <p>Panjang jembatan JLS rencana = 7.742,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Tembus Lawang Batu = 385,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 45,00 m</p>	40,75	43,69

5.	Prosentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha	$(\sum \text{Kab./ Kota berpredikat WTN})/(\sum \text{Kab./ Kota di Jawa Timur}) \times 100\%$	54,00%	55,00%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79,00	81,00
7.	Persentase tingkat pelayanan air bersih (%)	$(\text{Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan pelayanan Air Bersih})/(\text{Jumlah Rumah Tangga yg membutuhkan Air Bersih}) \times 100\%$	61,89%	66,96%
8.	Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah (%)	$(\text{Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan pelayanan Air Limbah})/(\text{Jumlah Rumah Tangga yg membutuhkan Air Bersih}) \times 100\%$	63,34%	68,97%
9.	Persentase pelayanan drainase perkotaan (%)	$(\text{Jumlah KK yg terlayani oleh saluran drainase perkotaan})/(\text{Jumlah KK yang membutuhkan saluran drainase}) \times 100\%$	79,96%	84,37%
10.	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (%)	$(\text{Volume sampah RT yg dapat ditampung di TPA})/(\text{Volume sampah RT}) \times 100\%$	82,96%	88,18%
11.	Persentase rusun terbangun	$(\text{Jumlah KK golongan MBR yg memiliki rumah})/(\text{Jumlah KK golongan MBR}) \times 100\%$	33,90%	63,65%
12.	Luas areal layanan irigasi (ha)	Luas tanam musim Tanam I+II+III pada areal pertanian beririgasi teknis	2.055.362	2.055.362
13.	Persentase kinerja jaringan irigasi	$((\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik})/(\text{Panjang jaringan irigasi total})) \times 100\%$	68,07%	69,12%
14.	Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku	$((\text{Volume ketersediaan air baku})/(\text{Volume kebutuhan air baku})) \times 100\%$	87,22	90,75
15.	Persentase Penurunan luas genangan banjir (ha)	$(\text{Luas genangan banjir tahun (n)})/(\text{Luas genangan banjir tahun (n-1)}) \times 100\%$	78,86%	60,11%
16.	Rasio ketersediaan listrik	$(\text{Ketersediaan Listrik})/(\text{Kebutuhan Listrik})$	71,53	74,03
17.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	$(\text{RT pengguna Listrik})/(\text{Jumlah Rumah Tangga}) \times 100\%$	99,58%	99,64%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1. Meningkatkan kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)	$= (\sum \text{Jalan provinsi kondisi baik+sedang}) / (\sum \text{Panjang jalan provinsi}) \times 100\%$ <p>Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI (International Roughness Index)) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI (Road Condition Index)). Kondisi baik nilai IRI 0-4, kondisi sedang nilai IRI 4-8; RCI minimum sedang</p>	85,27%	86,90%	88,43%	90,70%	93,73%	97,54%	<p>Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan saran dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.</p> <p>Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efektif dan efisien.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3) Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan 5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%)	$(\sum \text{Jalan provinsi memenuhi parameter}) / (\sum \text{Panjang jalan provinsi}) \times 100\%$ <p>Parameter jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi penyediaan prasarana b. Lalu lintas harian rata-rata (smp/hari) c. Lebar jalur lalu lintas minimum d. Lebar bahu minimum 	40,63%	56,87%	59,01%	61,26%	63,61%	66,07%		

		e. Tipe perkerasan jalan minimum f. Kelandaian maksimum g. Kondisi bangunan pelengkap jalan (jembatan, gorong-gorong, dll) baik dan berfungsi											10) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian 11) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 12) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut 13) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara 14) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi
	Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	$= (\sum \text{Panjang jalan yang terbangun}) / (\sum \text{Panjang rencana}) \times 100\%$ Panjang jalan JLS rencana = 673,872 km Panjang Jalan Tembus Lawang Batu = 33,907 km Panjang Jalan Akses PIMPA = 3,300 km Panjang Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 64,000 km	40,63%	44,55%	48,65%	52,95%	57,45%	62,17%					
	Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	$= (\sum \text{Panjang jembatan yang terbangun}) / (\sum \text{Panjang rencana}) \times 100\%$ Panjang jembatan JLS rencana = 7.742,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Tembus Lawang Batu = 385,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 45,00 m	40,75%	45,98%	51,47%	57,21%	63,46%	70%					
	Prosentase kabupaten/kota berpredikat Wahana Nugraha	$(\sum \text{Kab./ Kota berpredikat WTN}) / (\sum \text{Kab./ Kota di Jawa Timur}) \times 100\%$	54,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%					

	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79,00	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00		
2.Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase tingkat pelayanan air bersih (%)	(Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan pelayanan Air Bersih) / (Jumlah Rumah Tangga yg membutuhkan Air Bersih) x 100%	61,89%	62,96%	63,96%	64,96%	65,96%	66,96%	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah.	1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi. 2) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum. 3) Program Pengembangan Perumahan
	Persentase Pelayanan Air Limbah (%)	(Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan pelayanan Air Limbah) / (Jumlah Rumah Tangga yg membutuhkan Air Bersih) x 100%	63,34%	64,97%	65,97%	66,97%	67,97%	68,97%		
	Persentase pelayanan drainase perkotaan (%)	(Jumlah KK yg terlayani oleh saluran drainase perkotaan) / (Jumlah KK yang membutuhkan saluran drainase) x 100%	79,96%	81,97%	82,12%	82,87%	83,62%	84,37%		
	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (%)	(Volume sampah RT yg dapat ditampung di TPA) / (Volume sampah RT) x 100%	82,96%	84,58%	85,48%	86,38%	87,28%	88,18%		
	Persentase rusun terbangun	(Jumlah KK golongan MBR yg memiliki rumah) / (Jumlah KK golongan MBR) x 100%	33,90%	44,27%	49,11%	53,96%	58,8%	63,65%		

3.Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas areal layanan irigasi (ha)	Luas tanam musim Tanam I+II+III pada areal pertanian beririgasi teknis	2.055.362	2.055.362	2.055.362	2.055.362	2.055.362	2.055.362	Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan.	1) Program Konservasi Sumber Daya Air 2) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air 3) Program Pengendalian Daya Rusak Air
	Presentase kinerja jaringan irigasi	((Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik)/(Panjang jaringan irigasi total)) x 100 %	68,07%	68,20%	68,40%	68,60%	68,85%	69,12%	Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.	
	Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku	((Volume ketersediaan air baku)/(Volume kebutuhan air baku)) x 100 %	87,22%	87,66%	87,89%	87,99%	89,23%	90,75%		
	Persentase Penurunan luas daerah genangan banjir	(Luas genangan banjir tahun (n) / Kinerja Luas genangan banjir tahun (n-1) x100 %	78,86%	77,61%	75,73%	69,48%	63,23%	60,11%		
4.Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	Rasio ketersediaan listrik	(Ketersediaan Listrik) / (Kebutuhan Listrik)	71,53	72,03	72,53	73,03	73,53	74,03	Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan.	1) Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan 2) Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi, serta Pengawasan Pertambangan Umum/SD Mineral dan Migas. 3) Program Pengelolaan Air Tanah. 4) Program Pengembangan Sumber daya Geologi dan Bencana Geologi
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	(RT pengguna Listrik) / (Jumlah Rumah Tangga) x 100%	99,58%	99,60%	99,61%	99,62%	99,63%	99,64%	Meningkatkan pengelolaan pertambangan/Suber daya mineral dan migas. Meningkatkan penelitian dan pengembangan sumber daya geologi lingkungan dan bencana geologi.	

MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN PENATAAN RUANG.

TUJUAN 13				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan kelestariannya	1 Luas konservasi kawasan hutan (ha)	Luas kawasan hutan yang dikonservasi per tahun Keterangan : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap	10.000	10.000
	2 Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	5,00	5,00
	3 Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	(Jumlah titik pantau peningkatan @kualitas air)/(Jumlah Titik Pantau) x 100%	30,00%	36,00%
	4 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO ₂)	Perhitungannya mengacu kepada IPCC Guidline 2006 untuk negara-negara Asia. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah naiknya konsentrasi gas karbon dioksida (CO ₂) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO ₂ ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.	4,00%	4,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi	Luas konservasi kawasan hutan (ha)	Luas kawasan hutan yang dikonservasi per tahun Keterangan : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Meningkatkan pengendalian, perluasan dan rehabilitasi hutan.	10) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 11) Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2.Meningkatnya sumber mata air terkonservasi	Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi.	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut	Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	(Jumlah titik pantau peningkatan kualitas air)/(Jumlah Titik Pantau) x 100%	30,00%	32,00%	33,00%	34,00%	35,00%	36,00%	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh dtskeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir dan laut.	3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4) Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

4. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO ₂)	<p>Perhitungannya mengacu kepada IPCC Guideline 2006 untuk negara-negara Asia.</p> <p>Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah naiknya konsentrasi gas karbon dioksida (CO₂) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO₂ ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.</p>	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	Melaksanakan adaptasi dan migrasi perubahan iklim.	
---	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

TUJUAN 14					
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019	
Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	1	Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	(Jumlah kawasan strategis provinsi yg @telah dikendalikan)/(Jumlah kawasan strategis provinsi) x 100%	50,94%	100%
	2	Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	5,00	7,00
	3	Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	(Jumlah RTR Perkotaan Kab./ Kota yg telah dievaluasi)/(Jumlah RTR Perkotaan Kab./ Kota) x 100%	10,00%	100,00%
	4	Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	(Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang berhasil dimediasi)/(Jumlah kasus pemanfaatan ruang) x 100%	70,00%	80,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	(Jumlah kawasan strategis provinsi yg telah dikendalikan)/(Jumlah kawasan strategis provinsi) x 100%	50,94%	58,97%	69,23%	79,49%	87,18%	100%	Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	1) Program Perencanaan Tata Ruang 2) Program Pemanfaatan Ruang 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten /Kota	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		

	Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	(Jumlah RTR Perkotaan Kab./ Kota yg telah dievaluasi)/(Jumlah RTR Perkotaan Kab./ Kota) x 100%	10,00%	10,00%	25,00%	45,00%	70,00%	100,00%	Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar pemanfaatan ruang di Jawa Timur.	
	Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	(Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang berhasil dimediasi)/(Jumlah kasus pemanfaatan ruang) x 100%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	80,00%	Peningkatan ketaatan rencana tata ruang di Provinsi Jawa Timur.	

MISI 4 : MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK.

TUJUAN 15					
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019	
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik	1	Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	25,00	71,00
	2	Hasil EKPPD	Hasil Evaluasi KPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	ST	ST
	3	Penilaian SAKIP	Penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian PAN RB	A	A
	4	Jumlah raperda inisiatif dewan	Jumlah raperda inisiatif dewan	3	11
	5	Opini BPK	Opini BPK	WDP	WTP
	6	Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	(Jumlah SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan)/(Jumlah SKPD Prov Jawa Timur) x 100 % Keterangan : Standarisasi Pengelolaan Arsip sesuai Pergub No. 26/2009 tentang Pengelolaan Tata Kearsipan	20,00%	60,00%
	7	Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)	(Jumlah korban bencana tertangani)/(Jumlah korban bencana) x 100%	100%	100%

SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM	
				2015	2016	2017	2018	2019			
1.Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	15,00	25,00	50,00	71,00	71,00	71,00	Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana/prasarana yang memadai serta memberikan bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4) Program Pencegahan Korupsi 	
2.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Hasil EKPPD	Hasil Evaluasi KPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Meningkatkan penerapan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 	

3.Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Penilaian SAKIP	Penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian PAN RB	A	A	A	A	A	A	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD.	1) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Jumlah raperda inisiatif dewan	Jumlah raperda inisiatif dewan	3,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya.	1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
5.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana/prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan)/(Jumlah SKPD Prov Jawa Timur) x 100 % Keterangan : Standarisasi Pengelolaan Arsip sesuai Pergub No. 26/2009 tentang Pengelolaan Tata Kearsipan	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	45,00%	60,00%	Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal..	1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah. 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

7.Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	(Jumlah korban bencana tertangani)/(Jumlah korban bencana) x 100%	(Jumlah korban bencana tertangani)/(Jumlah korban bencana) x 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra,tanggap dan pasca bencana).	1) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 2) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 3) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4) Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana
--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONI SOSIAL.

TUJUAN 16				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$(\text{Jumlah tempat ibadah})/(\text{Jumlah penduduk})$	3,96	4,63
	2 Persentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	$(\text{Jumlah kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan}) / (\text{jumlah kejadian bermotif SARA}) \times 100 \%$	100,00%	100,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$(\text{Jumlah tempat ibadah})/(\text{Jumlah penduduk})$	3,96	4,425	4,466	4,507	4,589	4,630	Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah.	1) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	Persentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	$(\text{Jumlah kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan}) / (\text{jumlah kejadian bermotif SARA}) \times 100 \%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	

TUJUAN 17				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	(Jumlah penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)/(Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) x 100%	100,00%	100,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	(Jumlah penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)/(Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) x 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<p>Meningkatkan kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban.</p> <p>Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 2) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

										5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUJUAN 18				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019
Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom)	1 Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$(\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}) / (\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya}) \times 100\%$	100,00%	100,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$(\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}) / (\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya}) \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal.	1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

TUJUAN 19					
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2014	KONDISI AKHIR 2019	
Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan	1	Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti	(Jumlah kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti) / (Jumlah kejadian terkait HAM) x 100 %	100,00%	100,00%
	2	Jumlah ormas (LSM) yang terdaftar	Jumlah ormas (LSM) yang terdaftar di Pemerintah	898,00	1.273,00

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2014	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti	(Jumlah kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti) / (Jumlah kejadian terkait HAM) x 100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Meningkatkan peran masyarakat didalam menegakan hukum.	1) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 2) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 3) Program Perbaikan Proses Politik
2.Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum	Jumlah ormas (LSM) yang terdaftar	Jumlah ormas (LSM) yang terdaftar di Pemerintah	898,00	983,00	1.033,00	1.113,00	1.193,00	1.273,00	Meningkatkan kesadaran masyarakat/ORMAS dan LSM agar mentaati Undang-Undang.	